

Pemberontakan OPM-KKB dalam Perspektif Etika Keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre

Aprilia Budi Jansent Armandany¹, Krispianus Alfa Wewake Sarhe,² Pius Pandor³
¹²³ Program Filsafat, STFT Widya Sasana Malang, Malang, Indonesia
E-mail: jansentarnandany@gmail.com,¹ neltinsarhe0915@gmail.com,² piuspandor@gmail.com³

	<i>This is an open-access article under the CC BY-SA license. Copyright © XXXX by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.</i>	
Diterima: 12-05-2023	Direview: 26-08-2023	Publikasi: 30-09-2023

Abstrak

Fokus tulisan ini menjelaskan persoalan pemberontakan OPM-KKB terhadap TNI-Polri dan warga sipil di Papua berdasarkan etika keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre. Tindakan pemberontakan tersebut dianggap tidak bermakna karena berdampak buruk bagi masyarakat sipil, TNI-Polri, dan keutuhan NKRI. Kebermaknaan suatu kegiatan menurut MacIntyre terkait dengan kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan keberanian. Etika keutamaan ini penting dalam menciptakan stabilitas kehidupan bersama, terutama dalam konteks pluralitas bangsa Indonesia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah studi kepustakaan dengan mendalami berita tentang pemberontakan OPM-KKB yang terdapat dalam media massa seperti koran, majalah, televisi, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemberontakan OPM-KKB tidak bermakna berdasarkan konsep pemikiran Alasdair Calmers MacIntyre, karena tidak memenuhi syarat kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan keberanian. Dalam upaya menangani persoalan ini, beberapa sumbangan pemikiran MacIntyre dan peneliti dapat diimplementasikan. Pertama, melalui rekonstruksi naratif untuk mengembalikan kesadaran bahwa manusia selalu berinteraksi dan bersatu dengan orang lain dalam hidupnya, sehingga pemberontakan seperti OPM-KKB tidak terulang dan individu memiliki tujuan hidup yang jelas. Kedua, dengan memperkuat tradisi, nilai-nilai sejarah yang membentuk kesadaran manusia sebagai bagian dari sebuah sejarah dapat disadari dan diterapkan dalam kehidupan bersama. Ketiga, melalui pendidikan karakter yang bertujuan mengurangi gerakan pemberontakan OPM-KKB serta mencegah provokasi kepada generasi muda di Papua untuk mengikuti gerakan tersebut, sehingga mereka semakin mencintai tanah NKRI. Melalui pendidikan karakter yang didasari etika keutamaan, nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan keberanian dapat terwujud. Dalam mengatasi persoalan ini, pendekatan melalui rekonstruksi naratif, penguatan tradisi, dan pendidikan karakter menjadi langkah penting untuk menciptakan stabilitas kehidupan bersama dan mencintai tanah air NKRI.

Kata Kunci: pemberontakan; OPM-KKB; kejujuran-kepercayaan; keadilan; keberanian.

Abstract

The focus of this paper is to explain the issue of the OPM-KKB rebellion against the TNI-Polri and civilians in Papua based on the ethical virtues of Alasdair Calmers MacIntyre. This act of rebellion was considered meaningless because it had a negative impact on civil society, the TNI-Polri, and the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. According to MacIntyre, the meaningfulness of an activity is related to honesty, trust, justice, and courage. This ethical virtue is important in creating the stability of shared life, especially in the context of the plurality of the Indonesian nation. The method used in this study is a literature study by exploring the news about the OPM-KKB rebellion which is contained in mass media such as newspapers, magazines, television, and the internet. The results showed that the OPM-KKB rebellion was meaningless based on Alasdair Calmers MacIntyre's concept of thought, because it did not meet the requirements of honesty, trust, justice and courage. In an effort to address this issue, several contributions from MacIntyre and researchers can be implemented. First, through narrative reconstruction to restore awareness that humans always interact and unite with other people in their lives, so that rebellions like the OPM-KKB are not repeated and individuals have clear goals in life. Second, by strengthening tradition, historical values that shape human consciousness as part of history can be realized and applied in common life. Third, through character education which aims to reduce the OPM-KKB rebellion movement and prevent provocation to the younger generation in Papua to join the movement, so that they love the land of the Republic of Indonesia

even more. Through character education based on ethical virtues, the values of honesty, trust, justice and courage can be realized. In overcoming this problem, approaches through narrative reconstruction, strengthening traditions, and character education are important steps to create stability in living together and loving the homeland of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords: rebellion; OPM-KKB,; honesty-trust; justice; bravery

1. Pendahuluan

Panorama etika politik zaman ini telah banyak ditandai dengan beragam persoalan. Karakter antropologis dalam suatu negara juga menjadi faktor yang begitu berpengaruh dalam suatu institusi politik. Mentalitas egoistis dijadikan *life style* yang lumrah dilakukan. Realitas ini bukan lagi hal yang tabu untuk diperlihatkan, melainkan dijadikan pertunjukan yang layak bagi konsumsi publik. Individu atau kelompok berlomba-lomba memperebutkan sesuatu yang diinginkan tanpa banyak mempertimbangkan apa konsekuensi dari sikap dan tindakan yang dilakukan. Situasi dunia zaman ini tidak kondusif lagi. Kriminalitas terjadi di mana-mana dan melahirkan beragam kasus yang merugikan khalayak banyak. Perang politik melahirkan, dengan jargon-jargon aksi pemberontakan yang telah banyak membius manusia di dunia, demi kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kekuasaan dijadikan *goal* dalam hidup. Taktik peperangan perebutan tahta dimunculkan demi melenggangkan kekuasaan.

Realitas inilah yang tengah terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Tindakan kriminal ini muncul di bagian timur Indonesia, tepatnya di daerah Papua Barat yakni aksi pemberontakan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi pemberontakan yang terjadi di Papua dilatarbelakangi oleh kehendak untuk membebaskan dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Aksi pemberontakan OPM dilandasi oleh sikap ketidakpuasan akan kesejahteraan rakyat yang dianggap tidak merata, lebih khusus bagi masyarakat Papua Barat. Organisasi Papua Merdeka ini beranggapan bahwa daerah Papua Barat dijadikan anak tiri oleh NKRI. Oleh karena itu, mereka menuntut keadilan dan pemerataan. Aksi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM pun berujung pada aksi penembakan antara KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) dan TNI-Polri dan bahkan baru-baru ini diberitakan yang menjadi korban penembakan oleh OPM-KKB ini adalah masyarakat sipil di antaranya masyarakat lokal, para pekerja PT, para guru, dan siswa.

Artikel ini akan membahas terkait masalah OPM-KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang terjadi di Papua beberapa minggu terakhir. Masalah ini diambil dari majalah Kompas edisi bulan April 2021. Diberitakan bahwa KKB melakukan aksi penembakan terhadap warga sipil di Papua. Aksi itu menewaskan tenaga pendidikan, anak sekolah, dan warga biasa.

Berdasarkan persoalan yang terjadi, MacIntyre menjelaskan bahwa untuk mencapai nilai internal suatu kegiatan bermakna sekaligus agar bermakna bagi pelakunya, maka keutamaan akan kejujuran dan kepercayaan, keadilan, dan keberanian menjadi syarat mutlak. Pengurangan akan salah satu dari tiga syarat tersebut berarti menghilangkan makna dari suatu kegiatan. Sebaliknya, menerapkan keutamaan tersebut memungkinkan pelaku atau partisipannya menggapai makna dari suatu kegiatan atau kegiatan itu menjadi bermakna baginya.

2. Metode

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dengan melakukan studi kepustakaan. Data primer didapatkan melalui berita harian Kompas dan Tempo yang memuat penyelidikan terkait pemberontakan OPM-KKB. Data ini kemudian dibaca berdasarkan filsafat etika keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre yang terdapat dalam bukunya yang berjudul *After Virtue* (1981). Selain itu, penulis juga mencari literatur dalam beberapa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang memuat tema serupa sebagai data sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Selayang Pandang Tentang OPM (Operasi Papua Merdeka) dan KKB Papua (Kelompok Kriminal Bersenjata)

Fakta historis mencatat bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul di Irian Jaya. Dalam OPM sendiri tergabung dua faksi utama yakni organisasi yang didirikan oleh Aser Demotekay pada tahun 1963 di Jayapura. Kemudian faksi yang mengambil jalan kooperasi dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kemunculan organisasi ini tepat pada tahun 1970. Awal mulanya organisasi ini dipimpin oleh Aser Demotekay.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah nama yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada setiap organisasi atau faksi baik Irian Jaya maupun luar negeri yang dipimpin oleh putra-putra Irian Jaya pro-Papua Barat dengan tujuan untuk memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Sebutan OPM ini pertama kali *booming* di daerah Manokwari tahun 1964. Nama OPM semakin banyak dikenal ketika terjadinya pemberontakan senjata yang terjadi di Manokwari tahun 1965 dan pelbagai bentuk pemberontakan yang terjadi di distrik Irian Jaya. Latar belakang kemunculan sebutan OPM, bertolak dari kesepakatan para pejabat pemerintahan NKRI yang menyebut organisasi itu dengan sebutan OPM.

Kemudian apa itu KKB? KKB adalah Kelompok Kriminal Bersenjata. KKB dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Kelompok ini pada hakikatnya bergerak di bawah OPM. Nama KKB adalah nama yang sering disebut oleh aparat TNI-Polri bagi kelompok Organisasi Papua Merdeka yang memegang senjata api maupun senjata tajam.

Adapun beberapa kelompok pemberontakan yang ada di Papua dan nama pemimpin dari kelompok tersebut (Broek dan Hermawan, 2001), antara lain sebagai berikut.

- 1) Kelompok Hans Bomay di perbatasan Kerom dan PNG.
- 2) Kelompok Matias Wenda di perbatasan Kerom dan PNG.
- 3) Kelompok Willem Oden di Kabupaten Merauke.
- 4) Kelompok Tadeus Yogi di Peniai.
- 5) Kelompok Kelly Kwalik di Pegunungan Tengah.
- 6) Kelompok Paulus Kaladana dan Karel Uropkulin di Pegunungan Bintang

Inilah nama-nama kelompok OPM yang melakukan aksi pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Aksi mereka sering terjadi di berbagai tempat yang ada di Papua. Aksi gencatan senjata kerap menimbulkan banyak korban jiwa baik dari pihak OPM-KKB dan dari pihak TNI-Polri

Pemberontakan adalah sebuah gerakan yang pada waktu bersamaan bersifat mengagungkan sekaligus mengingkari (Camus, 2017). Pemberontakan adalah ekspresi dari kebutuhan manusia untuk memperoleh kehidupan yang selaras dan lengkap, yaitu memperoleh hak-haknya yang dirampas oleh masyarakat berkelas (Camus, 2017). Mereka semakin berselisih mengenai berbagai hal, seperti hak berbahasa, otonomi daerah, perwakilan politik, kurikulum pendidikan, tuntutan lahan, imigrasi, dan kebijakan naturalisasi lambang-lambang nasional, seperti lagu kebangsaan atau hari-hari besar nasional (Kymlicka, 1996). Karena itu, mereka menuntut penerimaan, penghormatan, dan bahkan penegasan publik akan identitas yang mereka miliki (Parekh, 2008).

Tuntutan inilah yang selalu menjadi masalah utama. Diskursus tentang sebab-sebab terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh OPM, pada hakikatnya bertitik tolak dari catatan sejarah dari dinas Militer Kodam XVII Cenderawasih. Dalam catatan sejarah ditemukan bahwa ada lima sebab terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh OPM antara lain, aspek politik, ekonomis, psikologis, sosial, dan ideologis (Djopari, 1995). Selain itu ada pula sebab-sebab pemberontakan antara lain sebagai berikut (Djopari, 1995; Tebay, 2016).

- 1) Masyarakat Papua memiliki rasa nasionalisme Papua, senasib, seperjuangan demi kemerdekaan bangsa Papua Barat.
- 2) Hendak mewujudkan janji Belanda yang tidak sempat terealisasi akibat integrasi dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil.
- 3) Latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat Papua Barat dengan bangsa Indonesia.
- 4) Masih ada perbedaan sosial, ekonomi, dan politik antara rakyat Papua Barat dan bangsa Indonesia.
- 5) Tereksplorasi hasil dari Papua Barat yang dilakukan secara besar-besaran untuk bangsa Indonesia, sedangkan rakyat Papua tetap miskin dan terbelakang.
- 6) Tekanan terhadap rakyat Papua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak awal integritas hingga saat ini.
- 7) Hendak mewujudkan cita-cita dari Gerakan cargo, yaitu suatu bangsa dan negara Papua Barat yang makmur di akhir zaman.
- 8) Masih adanya tuntutan referendum
- 9) Adanya sikap saling mencurigai dan tidak percaya antara orang Papua dan pemerintah Indonesia

Inilah beberapa sebab-sebab terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh OPM-KKB. Revolusi gagasan dan pemberontakan dapat membawa suatu perubahan (Sulasmono, 1998). Pemberontakan yang dilakukan oleh OPM-KKB yang terjadi di Papua, terjadi di beberapa daerah yang ada di Papua seperti; Peristiwa Kebar/Manokwari, Peristiwa Arfai/Manokwari, peristiwa pos Makbon, peristiwa pos sausapor, peristiwa pos Irai di Anggi, peristiwa Erambo di Merauke,

Peristiwa Dubu di Ubrub-Jayapura, peristiwa Enarotali, peristiwa Pyramid, Jayawijaya, peristiwa Biak Utara, dan Biak Barat, peristiwa di Sorong, dan peristiwa saat Pepera (Djopari, 1995). Aksi pemberontakan yang terjadi di Papua oleh OPM-KKB juga terjadi dalam beberapa bentuk pemberontakan seperti adanya pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, dan pelbagai macam gencatan senjata. Oleh karena aksi-aksi tersebut telah banyak memakan korban jiwa. Kejadian yang lebih miris lagi akhir-akhir ini adalah pemberontakan oleh OPM-KKB, terjadi dalam bentuk penembakan terhadap masyarakat sipil, mulai dari guru, anak sekolah, dan tukang ojek.

Target pemberontakan yang dilakukan oleh OPM-KKB ini bukan hanya pemerintah dan TNI-Polri lagi melainkan juga warga-warga sipil yang masih mempertahankan diri untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Aksi penembakan yang dilakukan oleh OPM-KKB akhir-akhir ini sangat meresahkan warga sipil yang ada di Papua. Penambahan personil satuan gabungan TNI-Polri, ditambahkan demi menghentikan aksi pemberontakan yang telah menimbulkan banyak korban jiwa, baik dari warga sipil maupun dari TNI-Polri sendiri. Semua wilayah yang ada di Papua semakin diperketat penjagaannya oleh satuan gabungan TNI-Polri demi mengamankan wilayah yang rawan aksi penembakan. Usaha memperluas penjagaan dan pengejaran terhadap OPM-KKB telah dilakukan oleh TNI-Polri secara intensif, mengingat telah banyak kasus penembakan yang menimbulkan korban jiwa. Sampai saat ini situasi di tanah Papua masih belum kondusif. Rentetan bunyi senjata api masih terdengar di mana-mana. Kegiatan patroli dilakukan secara cepat demi menghentikan aksi penembakan yang dilakukan oleh OPM-KKB.

b. Kasus OPM-KKB di Papua

Dalam *Kompas* (Senin, 17 Mei 2021, Hal. 1 dan 15) diberitakan bahwa upaya pengejaran KKB oleh aparat gabungan TNI-Polri dilakukan secara intensif demi melindungi warga sipil. Setelah pemerintah menetapkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris pada akhir April lalu, aparat gabungan terus memburu mereka yang menjadi bagian dari kelompok tersebut. Total ada empat anggota kelompok ini yang tewas ditembak saat kontak senjata dengan aparat dalam tiga hari terakhir. Dengan semakin intensnya perburuan oleh aparat keamanan, sejumlah kalangan meminta, perlindungan terhadap warga sipil di Papua tetap diprioritaskan. Jangan sampai upaya penegakan hukum justru memakan korban warga sipil.

Minggu (16/5/2021), satuan tugas (satgas) Nemangkawi yang terdiri dari gabungan personel TNI dan Polri mengabarkan telah menembak mati dua anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Lekagak Telenggen di Mayuberi, Kabupaten Puncak, Papua. Peristiwa ini terjadi saat kontak tembak aparat dengan KKB di Jembatan Mayuberi. Minggu pukul 03.19 WIT, seorang KKB dikabarkan terluka terkena tembakan, tetapi bisa melarikan diri. Kepala Humas Satgas Nemangkawi Komisaris Iqbal Alqudusy, yang berada di Ilaga, Kabupaten Puncak, mengatakan tidak ada aparat keamanan yang terluka akibat kontak tembak. Begitu pula masyarakat sipil. Aktivitas masyarakat Ilaga, ibu kota puncak, pun disebutkan kondusif setelah kontak tembak. "Satgas telah menguasai wilayah Mayuberi. Kami akan terus mengejar dan melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang ditetapkan sebagai teroris di Mimika, Puncak, Nduga dan Intan Jaya," ujarnya. Dari penyisiran di lokasi kontak tembak, aparat menyita sejumlah senjata milik KKB, yakni satu pucuk senjata jenis Mauser, dua magasin senjata Mauser, plus 17 butir amunisi. Selain itu disita pula satu perangkat radio panggil (*handy talkie/HT*), tiga KTP dan uang senilai 14 juta.

Adapun kabar bohong (hoaks) yang tersebar terkait penembakan tiga perempuan muda di Kawasan Ilaga Utara, Puncak, Papua, Sabtu (15/5) oleh aparat gabungan. Iqbal selaku Komisaris Besar membantah kabar yang beredar itu. Ia menyebut kabar itu sebagai berita bohong (hoaks). Dengan dua anggota KKB tewas tertembak, total satgas Nemangkawi telah menembak mati empat anggota KKB pimpinan Lekagak Telenggen dalam tiga hari terakhir. Salah satunya, tangan kanan Lekagak, Lasmin Waker yang tewas ketika kontak tembak, Kamis (13/5), KKB Lekagak ini dituding terlibat sejumlah aksi teror di Puncak beberapa tahun terakhir. Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri mengatakan, upaya penegakan hukum untuk menghentikan aksi KKB pimpinan Lekagak Telenggen akan terus dilakukan. "Kami bersama TNI telah memblokir area Sugapa, ibu kota Intan Jaya, dan dua distrik di Puncak, yakni Beoga dan Ilaga. Kami akan menghentikan aksi mereka," ujarnya. (Flo dan Dea, 2021).

Selain itu, kasus penembakan juga terjadi di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu (02/03/2022). Dalam *Kompas*, 08 Maret 2022, 08:12 WIB, diberitakan bahwa delapan pekerja jaringan tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Diketahui bahwa para korban ini tengah memperbaiki Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel. Dalam kasus penembakan ini dikabarkan bahwa satu orang pekerja selamat yang berinisial NS. Menurut NS

ada sepuluh orang anggota KKB yang melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Salah satu dari korban yang tewas itu, adalah anak kepala suku Gome di Ilaga yang bernama Bebi Tabuni (Rachmawati, 2022).

c. Etika Keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre

Keutamaan dalam kerangka kerja etika MacIntyre dikenali dari tiga pola penting di mana MacIntyre memperlihatkan alasan rasional yang mendasarinya. Keutamaan, pertama-tama, ia perlihatkan dari apa yang disebutnya dengan “kegiatan bermakna”. Dalam kegiatan bermakna, keutamaan disyaratkan demi terjamin mutu atau makna dari sebuah kegiatan. Keutamaan dalam kegiatan bermakna ini mencakup tiga keutamaan kunci, yakni kejujuran dan kepercayaan (*truthfulness dan trust*), keadilan (*justice*), dan keberanian (*courage*). (MacIntyre, 1981)). Kedua, MacIntyre yakin bahwa keutamaan juga terdeteksi dari bentangan kesatuan naratif kehidupan seseorang. Kesatuan naratif itu mempunyai keterarahan pada apa yang disebut *telos*, tujuan akhir. Hidup manusia adalah bentangan kesatuan naratif yang terarah pada *telos*. Dengan menyadari keterarahan pada *telos* ini, orang akan berupaya sebisanya. Ketiga, MacIntyre mengafirmasi bahwa keutamaan itu terdapat dalam tradisi moral. Tradisi yang dimaksudkan oleh Alasdair di sini adalah tradisi yang dihidupi terus-menerus dalam lintasan sejarah sebuah komunitas yang di dalamnya berbicara tentang apa yang baik atau buruk, apa yang wajib atau tidak melalui debat dan diskursus (Sudarminta, 2014).

Pertanyaan pertama untuk menelusuri jejak keutamaan dalam suatu kegiatan bermakna mesti dimulai dari pertanyaan tentang kegiatan bermakna itu sendiri. Bagaimanakah kegiatan bermakna itu? Kegiatan bermakna, singkatnya, merupakan suatu kegiatan yang punya maksud sosial, yang diatur secara formal atau tidak, dan merupakan kesatuan bermakna (Suseno, 2006). Suatu kegiatan disebut bermakna justru karena ia bermakna. Identifikasi kebermaknaan itu terletak pada nilai internalnya. Dan lagi, nilai internal itu dimengerti dari dua macam, yakni soal mutu atau kualitas dan soal kegiatan itu bernilai bagi partisipannya (Suseno, 1997; Theo, 2021). Pencapaian nilai internal itu mensyaratkan tiga keutamaan, yakni kejujuran dan kepercayaan, keadilan dan keberanian.

Dalam perspektif MacIntyre terkait poin kejujuran, MacIntyre menegaskan bahwa dalam suatu kegiatan yang dilakukan baik formal atau non formal, mesti dijalankan dengan menjunjung nilai kejujuran dan kepercayaan. Partisipan dalam suatu kegiatan mesti memperhatikan keutamaan ini. Singkatnya tanpa kejujuran dan kepercayaan dalam suatu kegiatan dapat mengakibatkan kegiatan menjadi tidak bermakna. Individu atau kelompok dituntut untuk berani bertindak jujur dan adanya kepercayaan, sehingga tidak ada kemunafikan dan kebohongan yang dapat menghapus makna dalam suatu kegiatan. Dengan demikian kegiatan itu akan menjadi lebih bermakna bagi partisipan dalam kegiatan tersebut.

Pada poin keadilan, MacIntyre menghendaki agar setiap individu atau kelompok yang melakukan suatu kegiatan mesti memperhatikan keutamaan ini. Individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu kegiatan harus dan wajib menjunjung tinggi keadilan. Bertindak adil dalam suatu kegiatan merupakan suatu keharusan. Tuntutan yang ada di dalamnya ialah perlakuan orang-orang yang ada disekitar secara adil, tanpa ada motivasi-motivasi lain di balik kegiatan tersebut. Singkatnya memperlakukan orang lain seturut ketentuan-ketentuan yang sewajar-wajarnya, tanpa ada tindak menganggap rendah atau meremehkan orang yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Keberanian yang dimaksud oleh MacIntyre adalah keberanian dalam menghadapi pelbagai tantangan yang ada dalam kegiatan bermakna. Individu atau kelompok dituntut untuk menjadi berani dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan. Keberanian merupakan keutamaan yang harus dilakukan, agar tidak menghilangkan makna yang terkandung dalam kegiatan tersebut. Keberanian dalam melakukan dalam suatu kegiatan merupakan sumbangsi dalam pemberian makna dalam kegiatan baik yang dilakukan individu ataupun kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Dengan kata lain, tiga keutamaan itu adalah dasariah bagi kemampuan seseorang untuk membawa diri sebagai warga umat manusia dalam menjalankan “kegiatan bermakna” apapun (Suseno, 1997). Ketiganya terjalin erat satu sama lain. Apabila salah satunya dikhianati, mutu internal itu mustahil tercapai. Sebab, kalau orang menipu, makna suatu kegiatan akan hilang. Hal serupa berlaku juga kalau keadilan. Ketika dalam kegiatan bermakna orang tidak menghargai orang lain setimpal dengan jasa orang lain itu, maka mutu internal itu hilang. Demikian kalau orang tidak berani menghadapi tantangan selama melakukan kegiatan internal, kegiatan itu akan kehilangan maknanya, sebab kegiatan itu tidak berhasil dan pelakunya tiada lain adalah pengecut. Sampai di sini, keutamaan menurut MacIntyre, sebagaimana dikutip Magnis Suseno,

berarti mutu seseorang dalam partisipasinya dalam sebuah kegiatan bermakna (Suseno, 1997). Ketiga, keutamaan tadi penting bagi kegiatan bermakna sebab nilai eksternal dari setiap kegiatan kerap mengerdilkan nilai internalnya. Namun, kegiatan bermakna harus membawa makna bagi kehidupan seseorang.

d. Analisis Kasus Penembakan KKB di Papua dalam Kacamata Teori Keutamaan Alasdair Calmers Macintyre

Setelah menyimak dan melihat apa yang menjadi sebab pemberontakan yang dilakukan oleh oknum KKB Papua, poin selanjutnya yang menjadi pokok pembahasan ialah menganalisa kasus KKB, dengan teori pemikiran Macintyre tentang suatu kegiatan bermakna. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Macintyre sangat menekankan beberapa keutamaan dalam suatu kegiatan bermakna. Pertanyaan yang kemudian muncul; apakah aksi pemberontakan yang dilakukan oleh KKB Papua, merupakan kegiatan yang bermakna? Apakah aksi pemberontakan KKB Papua telah memenuhi syarat suatu kegiatan yang bermakna? Apakah kegiatan pemberontakan terdapat nilai kejujuran dan kepercayaan, keadilan dan keberanian? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan penuntun dalam menganalisa kasus pemberontakan KKB Papua.

Bertolak dari aksi pemberontakan yang dilakukan KKB Papua terhadap pemerintah Indonesia, maka ditemukan banyak sebab yang terjadi dari aksi pemberontakan tersebut. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh KKB Papua terhadap TNI-Polri dan warga sipil menjadi diskursus yang penting akhir-akhir ini. Dalam berita televisi dan media cetak tampak bahwa kasus penembakan yang terjadi di Papua kian hari kian meningkat dan itu dilihat dari banyaknya korban yang terus berjatuhan baik itu dari pihak KKB Papua sendiri maupun TNI-Polri dan warga sipil di Papua. Aksi pemberontakan KKB Papua, pada hakikatnya memprihatinkan. Aksi penembakan yang dilakukan merugikan satu dengan yang lainnya baik dari pihak KKB Papua sendiri maupun dari pihak TNI-Polri dan warga sipil di tanah Papua. Proses negosiasi sesungguhnya telah dilakukan baik secara internal maupun eksternal dengan melibatkan banyak aktor di Papua seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati), anggota TNI, Polri yang bertugas menjaga perdamaian di Papua dengan pihak OPM-KKB yang terdiri dari kepala suku, tokoh agama dan masyarakat sipil Papua (Kaisupy & Maing, 2021). Namun, proses negosiasi tidak menemukan titik terang dan kesepakatan yang mendamaikan.

Jika dikaitkan dengan konsep pemikiran Macintyre, apakah kasus penembakan KKB di Papua adalah suatu kegiatan yang bermakna? Macintyre menegaskan bahwa dalam suatu kegiatan bermakna partisipan harus memperhatikan beberapa keutamaan, seperti yang telah dijelaskan di atas. Jika ditelisik secara menyeluruh maka ditemukan ada banyak kejanggalan terkait problem yang terjadi di Papua akhir-akhir ini. Terdapat banyak ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak ada keberanian. Pihak KKB bersikukuh untuk mempertahankan apa yang menjadi komitmen mereka. Bagi OPM-KKB berpisah dari NKRI merupakan suatu jalan utama dan terbaik. Namun, yang menjadi persoalan dasarnya ialah tidak semua orang Papua yang ingin memisahkan diri dengan NKRI. Hanya oknum-oknum tertentu, yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Inilah letak kejanggalan utama dari aksi pemberontakan OPM-KKB. Pemerintahan Indonesia menganggap bahwa tindakan pemberontakan dapat memecah belah kedaulatan NKRI. Pada dasarnya kedaulatan negara adalah unsur terpenting dalam urusan hubungan internasional (Thompson, 2009). Jika kedaulatan negara rusak atau terpecah maka hubungan internasional tidak akan terlaksana dengan baik. Aksi pemberontakan ini akan berdampak pada keresahan masyarakat dan situasi menjadi kurang kondusif.

Tindakan provokasi bermunculan dari pihak-pihak terkait. OPM-KKB berusaha untuk memprovokasi masyarakat setempat, demi kepentingan individu atau kelompok-kelompok tertentu dalam OPM-KKB demi menduduki kekuasaan. Tindakan yang mereka lakukan adalah mengarang cerita-cerita bohong (hoaks) di tengah masyarakat. Contohnya: OPM-KKB mengatakan bahwa TNI-Polri telah menganiaya dan melakukan penembakan terhadap warga sipil yang ada di Papua dan hal itu telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Efek dari tindakan mengarang cerita bohong (hoaks), berujung pada kurangnya kepercayaan dan rasa simpati rakyat Papua terhadap TNI-POLRI. Selain itu mereka juga memunculkan isu-isu SARA dalam persidangan internasional, di mana dikatakan bahwa NKRI sama sekali tidak memperhatikan kehidupan masyarakat di Papua, Papua selalu menjadi yang terbelakang dan dijadikan anak tiri di dalam NKRI. Namun, argumentasi yang dibawa ke dalam persidangan internasional, tidaklah benar dan tidak sesuai dengan realitas yang sesungguhnya. OPM-KKB telah memiliki catatan hitam karena aksi kriminal yang pernah mereka lakukan. Aksi kriminalitas yang dilakukan OPM-KKB berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI,

oleh karena itu aksi yang mereka lakukan ini harus dihentikan dengan segera. Jika dilihat dari konsep pemikiran MacIntyre, maka tindakan mengarang cerita-cerita bohong (hoaks) yang dilakukan oleh OPM-KKB telah meniadakan satu keutamaan dalam suatu kegiatan bermakna yakni kejujuran dan kepercayaan.

Selain itu ada pula sikap tidak adil yang dilakukan oleh OPM-KKB. Fakta penembakan terhadap puluhan pekerja PT. Istaka Karya merupakan salah satu bukti dari kebrutalan aksi pemberontakan ini. Semua pekerja dibantai secara sadis. Padahal para pekerja itu, sedang membangun jalan dan jembatan untuk kemajuan Papua. Inilah letak ketidakadilan dari OPM-KKB. Mereka menuntut agar pembangunan setiap daerah yang ada di wilayah NKRI itu harus merata termasuk wilayah Papua. Ketika permintaan pembangunan yang merata itu mulai dijalankan oleh pemerintah Indonesia, demi memenuhi permintaan masyarakat Papua, kenyataan yang muncul pun berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Ada banyak kejanggalan dan masalah-masalah baru yang muncul seakan-akan tidak pernah habis di tanah Papua.

Aksi penembakan terhadap pekerja PT. Istaka Karya adalah bukti ketidakadilan OPM-KKB. Hal itu dikarenakan telah merugikan salah satu pihak yang terkait di dalamnya, yakni pemerintah Indonesia. Dalam konsep pemikiran MacIntyre setiap kegiatan yang tidak mengutamakan suatu keadilan, bukanlah suatu kegiatan yang bermakna. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa aksi penembakan terhadap para pekerja PT. Istaka Karya tidak termasuk dalam suatu kegiatan yang bermakna karena dalam suatu kegiatan yang bermakna poin keadilan merupakan salah satu aspek utama dalam suatu kegiatan, sehingga kegiatan itu dapat dikatakan sebagai kegiatan yang memiliki makna atau bermakna.

Dalam konsep pemikiran MacIntyre salah satu syarat dalam mewujudkan suatu kegiatan bermakna adalah keberanian. Adanya keberanian dalam suatu kegiatan, dapat memberi makna dalam kegiatan yang dilakukan. Pertanyaan yang kemudian muncul apakah aksi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM-KKB ini adalah suatu tindakan yang berani? Jika jawaban ini dijawab dari pihak OPM-KKB sudah jelas bahwa tindakan mereka adalah suatu tindakan yang berani. Keberanian dari aksi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM-KKB ini terlihat dari banyaknya kasus penembakan yang mereka lakukan terhadap TNI-Polri dan warga-warga sipil yang ada di Papua. Namun, pertanyaan yang kemudian muncul apakah keberanian untuk melakukan dialog dengan pihak pemerintah itu juga ada? Sudah jelas bahwa keberanian untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia itu tidak ada. Hal itu tampak melalui aksi mereka yang selalu bersembunyi di balik masyarakat sipil di Papua. Masyarakat sipil dijadikan tameng dalam menghadapi pemerintah Indonesia. Dengan demikian, jelas bahwa aksi dari OPM-KKB, sama sekali tidak memiliki keberanian. Jadi, dapat dikatakan aksi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM-KKB ini telah menghilangkan apa yang menjadi syarat dalam menghadirkan suatu kegiatan yang bermakna menurut MacIntyre.

e. Relevansi Etika Keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre Bagi Persoalan Pemberontakan OPM-KKB

Setelah mengulas persoalan OPM-KKB yang terjadi di Papua dalam terang etika keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre, benang merah yang didapat adalah pemberontakan yang dilakukan oleh para oknum OPM-KKB merupakan peristiwa yang di dalamnya tidak terkandung kegiatan bermakna. Dikatakan sebagai peristiwa yang di dalamnya tidak terkandung kegiatan bermakna karena dalam pemberontakan tersebut tidak memuat nilai kejujuran, keadilan dan keberanian. Dengan hilangnya ketiga nilai ini, pemberontakan OPM-KKB di Papua dilihat sebagai "kegiatan yang menyeleweng". Pemberontakan yang terjadi di Papua oleh oknum OPM-KKB telah mencederai nilai kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, persaudaraan dan persatuan yang termuat dalam nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, etika keutamaan Alasdair Calmers MacIntyre memberi petunjuk arah dalam menyelesaikan persoalan OPM-KKB, antara lain:

1) Rekonstruksi naratif

Dalam etika keutamaan yang digagasnya, Alasdair Calmers MacIntyre yakin bahwa keutamaan juga terdeteksi dalam bentangan kesatuan naratif kehidupan seseorang. Mengapa demikian? Menurut MacIntyre, suatu kegiatan menjadi suatu kegiatan bermakna jika kegiatan tersebut mampu mambaur secara utuh dalam keseluruhan hidup yang menjadi kesatuan naratif. (MacIntyre, 1981). Kesatuan naratif itu mempunyai keterarahan pada apa yang disebut *telos*, tujuan akhir. Dalam keterarahannya akan *telos*, seorang individu akan ditempatkan dengan sesamanya sehingga menjalani kehidupan bersama dalam sebuah komunitas. Karena itu, kegiatan bermakna MacIntyre hanya dapat dipahami jika memiliki hubungannya dalam interaksi dengan orang lain (Amin, 2017). Perlunya rekonstruksi naratif dengan demikian memaksudkan

pengembalian kesadaran bahwa manusia dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam interaksi itu nilai kejujuran, keadilan dan keberanian harus ditunjukkan. Bukan sebaliknya seperti yang dilakukan oleh OPM-KKB yang dalam kegiatan pemberontakan telah menghilangkan kesadaran naratif yang mereka miliki. Karena itu, rekonstruksi naratif di sini menjadi *urgent* dan penting, sebab di dalam rekonstruksi naratif, semangat komunitarian yang di dalamnya memuat nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, kebersamaan dan persaudaraan digapai. Dengan demikian, manusia mampu meraih *telosnya*.

2) Memperkuat Tradisi

Kehidupan manusia selalu berhubungan erat dengan tradisi. Tradisi merupakan adat kebiasaan yang diwariskan turun-temurun untuk dilakukan dan dihayati dalam hidup. Bagi MacIntyre, tradisi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan bermakna sebab di dalam tradisi memuat nilai-nilai sejarah yang menyadarkan manusia bahwa dirinya merupakan bagian dari sebuah sejarah (MacIntyre, 1981). Pertanyaannya kemudian adalah apa peran keutamaan dalam tradisi? Keutamaan sebuah tradisi adalah kenyataan di mana orang-orang mampu memperkuat atau memperlemah dan juga ambil bagian dalam menghayati keutamaan-keutamaan yang relevan bagi hidupnya. Jika, orang-orang tersebut terlibat di dalam sebuah tradisi dan kemudian tidak memunculkan nilai kejujuran, keadilan dan keberanian, maka di sana terjadi kekaburan makna dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Karena itu, menurut MacIntyre, kesadaran yang memadai akan nilai-nilai dari sebuah tradisi yang di mana orang-orang ikut terlibat menjadi penting.

Kasus pemberontakan OPM-KKB di Papua menggambarkan dengan jelas bagaimana oknum-oknum yang melakukan tindakan kekerasan tidak memelihara tradisi bangsa Indonesia. Atau dengan kata lain, para oknum tersebut melupakan sejarah hidupnya. Bahwasannya, para anggota OPM-KKB yang melakukan tindakan kekerasan melupakan perjuangan bersama dari pendahulu mereka dan seluruh masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan Jepang. Lebih dari itu, para oknum tersebut melupakan falsafah yang terkandung dalam Pancasila yang diwariskan oleh para pejuang dan pemimpin negara terdahulu, yakni "gotong-royong". Dalam semangat "gotong-royong" tersebut terkandung nilai-nilai seperti yang sangat kompleks seperti kemanusiaan, kebersamaan, persatuan, persaudaraan dan lain-lain. Karena itu, kesadaran yang penting yang harus hadir dalam setiap pribadi untuk mencintai tanah air, yakni bersikap jujur, adil dan berani seperti yang termuat dalam kegiatan bermakna dari MacIntyre.

3) Pendidikan Karakter

Persoalan (pemberontakan) yang terjadi di Papua oleh oknum OPM-KKB adalah persoalan sosial yang meliputi sisi antropologi, epistemik dan politis. Berkaitan dengan segi antropologi, persoalan atau pemberontakan yang dilakukan oleh OPM-KKB bersinggungan dengan oknum-oknum yang tergabung dalam kelompok tersebut karena alasan-alasan tertentu seperti yang telah diulas pada bagian sebelumnya. Dari segi epistemik, oknum-oknum OPM-KKB belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) seutuhnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan sejarah dan dimanfaatkan oleh anggota kelompok elit politik OPM-KKB. Berkaitan dengan segi politis gerakan OPM-KKB merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari Negara kesatuan Republik Indonesia karena alasan-alasan tertentu yang telah diurai pada bagian sebelumnya. Pertanyaan yang muncul kemudian bagaimana menanggulangi gerakan OPM-KKB di Papua menjadi sebuah "kegiatan bermakna" seperti yang dikatakan oleh MacIntyre?

Menurut MacIntyre sebuah kegiatan disebut sebagai kegiatan bermakna jika di dalam kegiatan tersebut mengandung nilai jujur, adil dan berani. Salah satu cara untuk mencapai kegiatan bermakna yang ditawarkan oleh peneliti, yakni pendidikan karakter. Pendidikan karakter, menurut Koesoema (dalam Pandor, 2020), adalah pendidikan yang bersinggungan dengan sisi relasional antara pribadi dengan pribadi maupun pribadi dengan semua dimensi yang ada di sekitarnya. Tujuannya, supaya pribadi yang bersangkutan mampu bertanggung jawab dengan kebebasan yang dimilikinya. Dengan demikian, pendidikan karakter berciri dimensi sosial-kultural. Menurut Sugiharto (dalam Pandor 2020) pendidikan karakter memiliki dua belas nilai kehidupan yang perlu diperhatikan, yakni kedamaian, penghargaan, cinta, toleransi, kerendahan hati, kejujuran, kerja sama, kebahagiaan, tanggung jawab, kesederhanaan, persatuan dan kebebasan. Dengan memperhatikan dua belas nilai di atas, dapat meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Dalam konteks gerakan OPM-KKB, tawaran ini dimaksudkan agar gerakan pemberontakan dari OPM-KKB berkurang serta orang muda di Papua tidak

terprovokasi untuk mengikuti gerakan OPM-KKB dan semakin mencintai tanah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Adapun beberapa metode yang ditawarkan oleh Pandor dalam proses pendidikan karakter, yakni lewat pengajaran, keteladanan, menentukan prioritas, praksis prioritas dan refleksi. (Pandor, 2014).

4. Simpulan

Banyaknya aksi kriminalitas yang terjadi di tengah masyarakat pada hakikatnya membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Masalah pemberontakan yang dilakukan oleh OPM-KKB sudah menjadi masalah global yang menimbulkan keprihatinan banyak khalayak. Relasi antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat menjadi hambar karena adanya kepentingan-kepentingan egoistis. Kehidupan yang seharusnya saling berdampingan, malah diberi sekat oleh politik kekuasaan. Inilah realitas yang terjadi di tanah Papua. Kegiatan pemberontakan yang dilakukan oleh OPM-KKB bukanlah suatu kegiatan yang bermakna. Menurut Macintyre kegiatan yang memiliki makna adalah kegiatan yang di dalamnya menjunjung tinggi keutamaan yakni kejujuran, kepercayaan, keadilan dan keberanian. Setelah melihat secara keseluruhan kasus dan berangkat dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan dapat disimpulkan bahwa aksi pemberontakan yang dilakukan oleh OPM-KKB, telah mengabaikan keutamaan-keutamaan yang menjadi syarat dalam kegiatan bermakna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aksi pemberontakan OPM-KKB bukanlah suatu kegiatan bermakna.

5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Filsafat Keilahian Sekolah Tinggi Widya Sasana, Malang selaku institusi pendidikan yang menjadi tempat menimba ilmu para peneliti dan yang telah memfasilitasi peneliti dalam kegiatan pencarian sumber pustaka. Terima kasih juga peneliti sampaikan kepada para dosen yang telah membimbing penelitian kami ini. Akhirnya, para peneliti menyampaikan terima kasih kepada pihak Jurnal Filsafat Indonesia yang telah membaca, memberi saran dan mempublikasikan penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Camus, A. (2017). *Seni, Politik, Pemberontakan*. Narasi.
- Djopari, J. R. G. (1993). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Flo & Dea. (2021, Mei). Pengejaran Intensif Lindungi Warga Sipil. *Kompas*.
- Kaisupy, D. A., & Maing, S. G. (2021). Proses Negosiasi Konflik Papua: Dialog Jakarta-Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 82-98.
- Kymlicka, W. (1996). *Kewargaan Multikultural*, penterj. Edlina Hafmni Eddin. Penerbit LP3ES.
- MacIntyre, A. C. (1981). *After Virtue*. Notre Dame, Indiana. Notre Dame University Press.
- Mudzakkir, A. (2017). Kembalinya Tradisi: Rasionalitas dan Etika Komunitarian Alasdair MacIntyre. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 4(2), 147-147.
- Pandor, P. (2014). *Seni Merawat Jiwa: Tinjauan Filosofis*. Obor.
- Pandor, P. (2020). Pendidikan Karakter Sebagai Solusi Atas Fenomena Mcdonalisasi Pendidikan dalam Era Revolusi Industri 4.0. *Psiko Edukasi*, 18(1), 1-17.
- Parekh, B. (2008). *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. Kanisius.
- Rachmawati. (2022, Maret). 7 Fakta Penembakan 8 Pekerja di Puncak Papua, Anak Kepala Suku hingga Warga Bandung Ikut Tewas. *Kompas*.
- Sudarminta, J. (2014). Usulan A. Macintyre Kembali Ke Etika Keutamaan: Sebuah Solusi Atau Nostalgia Belaka?. *Kanz Philosophia: A Journal for Islamic Philosophy and Mysticism*, 4(1), 15-27.
- Sulasmono, B. S., dkk. (1998). *Keadilan dalam Kemajemukan*. Pustaka Sinar Harapan.
- Suseno, F. M. (2006). *Etika Abad Kedua Puluh: 12 Teks Kunci*. Kanisius.
- _____. (2000). *12 Tokoh Etika Abad ke-20*. Kanisius.
- _____. (1997). *13 Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks-teks Etika dari Plato sampai dengan Nietschze*. Kanisius.
- Tebay, N. (2016). Transformasi Konflik Papua. *Limen-Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 12(2, April), 82-106.
- Theo P.A. Van den Broek & Hermawan, J.B. (2001). *Memoria Passionis Di Papua*. Jakarta: LSPP-SKP.

- Theo, Y. (2021). Peremajaan Etika Keutamaan Aristoteles. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 27(1), 75-83.
- Thompson, J. M. (2009). *Keadilan dan Perdamaian: Tanggung Jawab Kristiani dalam Pembangunan Dunia*. BPK Gunung Mulia.